BAB I
PENDAIIUI.UAN

1.I Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapatan dan konvensasional yang mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang menandai untuk membuat mereka berda di atas ambang minimal kategori sejahtera.

Masalah kemiskinan menjadi masalah rumit sehingga negara tidak memiliki kemampuan menghapus kemiskinan secara sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga kemiskinan tidak dapat dihindari. Masalah kemiskinan bukan hal asing di negeri ini, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena pangan yang ada masih kurang tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Kehidupan modern masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Kemiskinan tidak sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hakhak dasar diakui secara umum yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Masalah sosial yang ada di Indonesia merupakan masalah yang relevan dikaji terus menerus. Masalah kemiskinan telah hadir sejak lama dan masih ada di masyarakat saat ini, gejalanya meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Dalam rangka percepatan penanggulangan

kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program

Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan utama Program Keluarga Harapan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan strategi penanzzulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu RT SM pada Sisi beban Cara mengurangi kemiskinan pemerintah Indonesia dan berbagai pihak Iainnya harus memiliki langkah yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. hal inilah yang ahirnya menjadi landasan Kementerian Sosial Republik Indonesia melahirkan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dan TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Program Keluarga Harapan merupakan lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Team Tenaga ahli PKH dan Konsultan World Bank serta diawasi oleh Undang — Undang yaitu :

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan non tunai kepada keluarga yang berhak menerima bantuan yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui dan memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta Program Keluarga Harapan akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Program Keluarga Harapan Sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara - negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Tramfers (CCT), yang diterjemahkan menjadu Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksud sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Kelaparan seringkali terjadi bukan karena makanan di daerah tersebut tidak mencukupi tetapi orang miskin tidak di perbolehkan dan tidak mempunyai hak untuk memakan makanan yang ada disana (Suharto, 2008 : 17), kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia, Untuk itu penulis sangat tertarik dalam menulis program tersebut baik sasaran dan penerapan sistem PKH ini, hal ini menjadi pembicaraan yang lagi hangat dikalangan masyarakat umumnya yang memperoleh bantuan dalam program PKH. Namun dalam pelaksanaanya Program Keluarga Harapan masih belum tersosialisasi kepada masyarakat miskin, selain itu masyarakat yang menerima bantuan PKH tetapi belum tersalurkan oleh bantuan tersebut. Hal ini terlihat pada saat pra survey yang dilakukakan beberapa tahun kemarin di Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo hal ini membuktikan masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Tibawa yang belum tersentuh program tersebut.

Tujuan program ini sangatlah mulia, yakni dapat meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan bagi warga penerima bantuan. Dengan adanya PKH masyarakat dapat merubah pola pikirnya untuk rutin memeriksakan kesehatan terutama bagi ibu hamil agar angka kematian pada ibu hamil dan melahirkan dapat ditekan dengan maksimal. Dalam bidang pendidikan, adanya bantuan PKH dapat mengembalikan lagi anak-anaknya yang telah putus sekolah dengan alasan kurang biaya maupun tidak ada biaya melanjutkan sekolah, untuk bisa kembali mengenyam pendidikan di sekolah sebagaimana mestinya. Sebelum tahun 2017 besaran dana PKH diberikan sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih duduk di bangku sekolah,

sehingga dana yang diterima setiap keluarga pun akan berbeda. Akan tetapi, sejak awal tahun 2017 terjadi pemerataan besaran dana bantuan PKH yaitu sebesar Rp 1.890.000,- per satu tahun dan akan disalurkan secara bertahap selama 3 bulan sekali sebesar Rp 500.000,- pada tahap pertama hingga tahap ketiga, dan sisanya akan diberikan pada saat tahap keempat sebesar Rp 390.000,- bantuan PKH tidak bersifat permanen dan hanya akan diberikan selama 6 tahun, hal ini dimaksudkan agar peserta penerima bantuan PKH Iebih bijaksana dalam mengalokasikan dana bantuan yang sudah diberikan. Setiap 3 tahun sekali akan dilakukan evaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan. Apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta PKH tidak melakukan syarat yang diberikan, maka status kepesertaannya akan dicabut dan dikeluarkan dari keanggotaan PKH.

Demikian pula halnya dengan peserta PKH yang dirasa sudah meningkat kesejahteraannya, semisal mendapatkan pekerjaan tetap ataupun anak — anaknya sudah lulus sekolah maka akan dihapus juga dari kepesertaan PKH. Sedangkan bagi peserta PKH yang masih belum meningkat kesejahteraannya meski sudah dibantu selama 3 tahun maka akan diberikan kesempatan mendapatkan bantuan PKH lagi dengan catatan harus menunjukkan perubahan yang baik dari segi ekonomi yang terjadi setelah mendapat kesempatan tersebut. Dengan adanya bantuan PKH ini Pemerintah menginginkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun peningkatan derajat sosial status ekonomi7.

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH dulunya melalui kantor POS terdekat, setiap keluarga harus diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga perempuan baik itu (ibu, nenek, bibi, atau kakak perempuan) sebagai Pengurus Keluarga. Akan tetapi, pada akhir bulan Juli 2016, Kementrian Sosial meluncurkan sebuah terobosan layanan yang diberi nama E-Warong atau Electronic-Warung. Hal menarik untuk diteliti dari program ini yaitu, pemerintah akan mengolaborasikan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan layanan E-Warong agar penyaluran bantuan bisa Iebih efektif dan efisien. Dengan kolaborasi tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan

pokok. Kebutuhan bahan pokok yang bisa didapatkan oleh masyarakat di E-Warong yakni beras, gula, minyak goreng dan tepung. Bantuan yang sifatnya pangan tidak bisa diambil secara tunai dan hanya bisa ditukar dengan bahan pangan yang sudah ditentukan. Alasannya, berdasarkan hasil riset Kementrian Sosial terkait upaya Pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras melalui subsidi masih berjalan kurang maksimal, masih banyak masyarakat miskin yang tetap tidak mampu membeli bahan kebutuhan pokok meskipun sudah disubsidi oleh Pemerintah. Oleh karena iłu, diciptakannya E-Warong ini bertujuan untuk memutus mata rantai penjualan bahan pokok, setiap barang yang dibeli disini akan mendapatkan harga yang paling murah karena barang didatangkan langsung dari distributor pusat

Dari uraian laar belakang tersebut kiranya menjadi dasar bagi peneliti dałam melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Tibawa”

1.2 Identifikasi Masalah

l. Bagaimana optimalisasi pelayanan penerima program keluarga harapan di kecamatan Tibawa

2. Bagaimana capaian kualitas pelayanan terhadap peserta Program Keluarga Harapan Di kecamatan Tibawa
3. Bagaimana pengawasan pendamping PKH Kecamatan Tibawa terhadap masyarakat penerima manfaat

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini fukus dałam masalah bagaimana ” Optimalisasi Pelayanan Bantuan Program
Keluarga Harapan Di Kecamatan Tibawa”

1.4 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan bagaimana peran pendamping dałam mengoptimalkan pelayanan bantuan Program Keluarga Harapan terhadap keluarga miskin

1.5 Manfaat penelitian

l . Manfaat Teoritis : memperdalam wawasan peneliti khusunya dalam hal Optimasisasi pelayanan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi diharapkan penelitian ini akan berguna dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan menambah bahan perpustakaan tentang kegiatan pelayanan publik ditingkat kecamatan.

b. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi mereka yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap kajian yang berhubungan dengan pelayanan public.